

MENGEMBANGKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN

Oleh: *Suyata*¹

Pendahuluan

Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar (wajar dikdas) 9 tahun mempunyai dua sisi utama yaitu perluasan/pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar dan peningkatan mutu pendidikan dasar tersebut. Yang pertama menyangkut segi kuantitatif menggunakan tolok ukur utama angka partisipasi kasar (APK) yang secara operasional mempunyai arti menaikkan terus menerus APK sampai semua anak usia sekolah tingkat pendidikan dasar berada dan menyelesaikan program belajar mereka. Ada dua isu pokok muncul bertalian dengan segi kuantitatif tersebut yaitu penyediaan tempat belajar (*supply*) dan pemanfaatan tempat yang tersedia (*demand*). Kemantapan *demand* akan terlihat pada semakin kecilnya angka jumlah putus sekolah anak-anak, keteguhan mereka untuk bertahan di sekolah, dan semakin kecilnya mereka yang tidak bersekolah. Hal serupa akan dapat dilihat pada makin besarnya angka transisi dari SD/MI ke SLTP. Yang kedua mengenai segi kualitatif meliputi masukan, proses, dan hasil-hasilnya. Masukan diharapkan makin memadai, prosesnya semakin mendorong dan mengundang belajar, dan rata-rata pencapaian belajar semakin baik. Hasil belajar berupa hal-hal kognitif maupun nonkognitif diharapkan terus naik.

Suyata adalah staf pengajar pada Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan
Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP YOGYAKARTA

Garapan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun secara kuantitatif nasional relatif cukup besar dan pada saat yang sama waktu penuntasannya dipercepat dari 15 tahun (awal perencanaan) menjadi 10 tahun (revisi kemudian). Percepatan ini membawa akibat terhadap tuntutan kenaikan tahunan APK yang relatif besar pula dengan konsekuensi logik beratnya tugas mengembangkan dimensi supply dan dimensi demand. Garapan mutu pendidikan dasar nampaknya akan lebih besar lagi berangkat dari tingkat pencapaian mutu yang ada sekarang.

Di tingkat daerah, baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten, beberapa juga tingkat kota madia, garapan wajar dikdas 9 tahun bervariasi berpangkal pada tingkat besarnya garapan, kondisi *supply* dan *demand*, dan kondisi penunjang dan/atau kendalanya. Pemetaan hal-hal tersebut sangat penting dan mendesak bagi keberhasilan penuntasannya. Jaringan Depdikbud, jaringan Depag, jaringan Depdagri, jaringan instansi penunjang, dan masyarakat luas secara sektoral maupun lintas sektoral perlu mengambil bagian secara aktif untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun.

Partisipasi atau peran serta masyarakat merupakan hal penting di dalam program penuntasan wajar dikdas 9 tahun baik menyangkut dimensi kuantitatif maupun dimensi kualitatif. Peran serta masyarakat meliputi keterlibatan secara aktif sektor birokrasi pemerintah (struktural dan nonstruktural) dan sektor nonpemerintah (swasta). Masyarakat di luar jajaran pemerintah meliputi antara lain orang tua para siswa dan kelompok-kelompok yang dianggap dan diharapkan memiliki kepedulian terhadap usaha pendidikan, badan usaha (yayasan), dan dunia usaha, organisasi profesi, organisasi dan badan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Mereka ini dapat digerakkan agar terlibat dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun di berbagai tingkat dan satuan penyelenggaraan pendidikan.

Peran serta masyarakat dalam menyediakan pendidikan di negara kita telah lama dikenal dan terdapat di semua daerah. Namun

demikian perlu disadari bahwa peran serta masyarakat tersebut relatif masih terbatas, bersifat insidental atau sesaat, dan biasanya hadir oleh adanya permintaan (karena diminta). Peran serta yang mereka dapat lakukan sesungguhnya lebih besar dari yang telah mereka kerjakan. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah masih terbatas cakupannya, misal terpusat pada penggalan dana untuk keperluan sekolah dalam mencukupi sarana/prasarana fisik. Pada umumnya peran serta masyarakat berbasis sekolah, yaitu melibatkan mereka yang memiliki kaitan dengan keberadaan siswa di sekolah. Peran serta masyarakat (misal orang tua dengan anak usia sekolah) terlihat pada kejadian tertentu misal pada saat orang tua berkepentingan dengan sekolah pada awal tahun ajaran baru bagi siswa baru.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan mutu pendidikan atau mutu sekolah dasar pada umumnya belum digerakkan secara luas, walaupun peningkatan mutu ini menjadi salah satu pilar kebijakan penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Memang di beberapa kasus, peran serta masyarakat untuk perbaikan mutu ini telah diusahakan, namun sebagai suatu gerakan nyata yang terencana dan luas belum terlihat. Masyarakat dan orang tua khususnya lebih tertarik pada mencari sekolah yang bermutu bagi anak-anak mereka dibandingkan dengan berusaha agar sekolah tempat anak mereka belajar semakin bermutu. Banyak kelompok masyarakat yang cukup potensial bagi usaha perbaikan mutu pendidikan dasar belum dimanfaatkan secara nyata dan terarah. Peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan sebenarnya telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1992. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menuangkannya dalam "*position paper*" yang disampaikan di forum pertemuan dengan badan donor bulan Agustus 1994. Lewat kesempatan ini Mendikbud mengajukan sejumlah permasalahan bagaimana memperbaiki pelaksanaan peran serta masyarakat yang telah diatur dalam PP 39/1994 tersebut dalam pembangunan pendidikan dan bagaimana melatih menggerakkan peran serta masyarakat sehingga

peranan mereka efektif. Ini merupakan tantangan yang perlu segera dijawab agar penuntasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar segera terwujud.

Ragam Kegiatan Terkait Penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun

Peran serta masyarakat dalam hal mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan/sekolah swasta oleh badan-badan swasta maupun perseorangan telah terjadi di sepanjang sejarah kehidupan bangsa kita. Bahkan pada mulanya, badan-badan swasta inilah yang memiliki prakarsa memberikan pendidikan secara luas kepada rakyat banyak. Gerakan pendidikan oleh swasta tersebut telah menghasilkan gerakan pendidikan nasional bangsa kita.

Namun demikian bila dilihat dari keterlibatan masyarakat terhadap pembangunan pendidikan di sektor pemerintah, peran serta masyarakat dapat dikatakan terbatas. Bahkan terdapat anggapan bahwa urusan pendidikan dan pengajaran adalah urusan Depdikbud, terutama pada tingkat pendidikan lanjutan pertama ke atas. Oleh karena itu pandangan yang berkembang menjadi "yang dapat dan perlu mengajak partisipasi haruslah Depdikbud". Perlu disadari bahwa proses dan hasil pendidikan melibatkan hal-hal yang sifatnya koinfluensial (*coinffluential*) yang berasal dari pengaruh banyak faktor. Ini membawa akibat bahwa keterlibatan masyarakat secara terarah perlu diusahakan oleh banyak pihak sejalan dengan kedudukan dan peranan masing-masing.

Dilihat dari segi perluasan akses kelompok masyarakat ke sekolah, manakala kondisinya memang seimbang dan mantap, yaitu keseimbangan antara *supply* dan *demand*, urusan pendidikan sering kurang merasakan perlunya peran serta masyarakat. Pada saat keseimbangan *supply* dan *demand* timbul, seperti tersedianya cukup tempat di sekolah namun peminat sangat kurang, atau peminat untuk sekolah sedemikian besar tetapi tempat yang tersedia terbatas, peran serta masyarakat dirasakan menjadi kebutuhan atau tuntutan. Peran serta mereka yang

berada di luar sektor pendidikan bagi urusan pendidikan menjadi sangat mendesak dan suatu keharusan.

Permasalahan sesungguhnya tentang peran serta masyarakat bukanlah terbatas pada ada atau tidak adanya keseimbangan *supply* dan *demand*. Seperti telah disinggung di atas, kegiatan pendidikan merupakan kegiatan pemrosesan anak-anak yang bercorak majemuk. Kegiatan ini dikerjakan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, jajaran Depdikbud perlu melibatkan secara lebih berencana pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pendidikan baik itu langsung maupun tak langsung. Ambillah contoh pendidikan di SLTP yang menerima siswa tamatan atau telah diproses oleh SD/MI. Sementara SLTP memroses anak-anak asuhannya pada hari-hari kerja, pihak lain juga akan melakukannya begitu mereka ini keluar dari sekolah. Pemrosesan yang kedua dapat saja berlainan atau bahkan bertentangan dengan pemrosesan yang pertama yang telah berlangsung di sekolah. Mata rantai pemrosesan ini terus berlangsung selama anak-anak ini berada di sekolah. Fenomena ini mengisyaratkan perlunya sekolah-sekolah melibatkan pihak luar sekolah untuk usaha pemrosesan anak-anak asuh tersebut guna mencapai tujuan yang ditetapkan secara terpadu.

Berkaitan dengan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun, sejumlah kegiatan untuk keberhasilannya sangat beraneka ragam. Keanekaragaman kegiatan memang diperlukan sebab tanpa itu program penuntasan tak akan berhasil. Berikut ini gambaran keanekaragaman kegiatan penuntasan wajar dikdas.

1. Pendataan anak usia wajib belajar dikdas 9 tahun. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui secara pasti besaran garapan wajar dikdas untuk berbagai tingkat wilayah. Jajaran pendidikan, terutama Depdikbud, perlu memperoleh dukungan dan bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah daerah, biro pusat statistik dan jajarannya, pemerintah desa dan perangkat penunjangnya, dan lain-lainnya.

2. Pemetaan sekolah dan dayaampungnya. Hal ini perlu dikatakan agar langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk mengalokasikan siswa dan menyediakan fasilitasampung lebih terarah.
3. Pemetaan lokasi siswa ke sekolah. Ini perlu agar rancangan pemanfaatan dayaampung diusahakan lebih optimal. Setiap kesatuan SLTP hendaklah memiliki daerah tangkapan (*catchment area*) berupa SD/MI dan penggunaannya secara jelas.
4. Perencanaan umum wajar dikdas 9 tahun. Perencanaan penuntasan wajar dikdas secara keseluruhan dari tahun ke tahun perlu disusun. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak.
5. Pengadaan/penambahan ruang kelas/unit gedung baru (RKB, UGB)
6. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
7. Pelatihan petugas pendataan wajar dikdas 9 tahun. Program pelatihan terhadap sejumlah pihak dalam segi pendataan untuk berbagai keperluan perlu dikerjakan. Dengan pelatihan tersebut pekerjaan pendataan akan berlangsung mengikuti kebutuhan.
8. Inventarisasi kendala pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun. Kendala-kendala wajar dikdas perlu diantisipasi dan diadakan langkah-langkah awal menanggulangnya.
9. Pembuatan brosur wajar dan penyebarannya. Informasi wajar dikdas dan hal-hal terkait perlu disebarluaskan.
10. Mobilisasi dana untuk penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Menghadapi dana pemerintah yang terbatas, sumber-sumber dana masyarakat perlu diketahui dan dimobilisasikan secara bijaksana.
11. Pemantauan putus sekolah SD/MI dan pencegahannya. Program penuntasan wajar dikdas di SLTP sangat tergantung pada tamatan-tamatan SD/MI dan putus sekolah akan menjadi kendala besar. Program mencegah putus sekolah perlu disusun dan dikerjakan.
12. Pemantauan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun berdasarkan mata rantainya. Agar program penuntasan wajar dikdas berhasil, kegiatan pemantauan secara terencana, terpadu dan tindak lanjut yang

jelas perlu diusahakan.

13. Pelatihan bagi para petugas penyuluhan wajar dikdas 9 tahun. Wajar dikdas perlu disebarluaskan dan dimasyarakatkan. Petugas pemasyarakatan wajar dikdas perlu disiapkan lewat berbagai bentuk pelatihan.
14. Usaha meningkatkan mutu sekolah dan evaluasinya. Mutu sekolah perlu ditingkatkan melalui berbagai usaha dan kegiatan baik itu tingkat internal sekolah maupun eksternal.
15. Penyebaran informasi pendidikan dan persekolahan.
16. Koordinasi kerja vertikal dan horisontal untuk berbagai ragam kegiatan.
17. Pemutakhiran data, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaannya.

Kegiatan-kegiatan di atas memerlukan peran serta masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan murah (manakala itu memang diperlukan). Untuk beberapa butir kegiatan akses jajaran Depdikbud relatif terbatas tanpa bantuan instansi lain. Pendataan penduduk usia pendidikan dasar (7-12 dan 13-15 tahun) per kesatuan lokasi: (kecamatan, kabupaten/kodja) memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat: pemda di berbagai tingkatan. Penyediaan prasarana pendidikan memerlukan juga kemudahan dari instansi lain: pertanahan, pemda, dan lain-lain. Memasuki wilayah dengan mengumpulkan orang tua dengan usia sekolah memerlukan dukungan pemerintah daerah. Hal-hal lain kiranya akan memerlukan peran serta masyarakat tersebut.

Sejumlah pihak di luar jajaran Depdikbud yang penting bagi keberhasilan pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun baik untuk sasaran kuantitatif maupun sasaran kualitatif dapat diperhatikan di daftar berikut. Peranan yang dapat mereka lakukan seringkali sangat bergantung pada usaha-usaha yang diprakarsai oleh jajaran Depdikbud.

1. Jajaran Pemda baik Dati I maupun Dati II
2. Camat, aparat kecamatan, dan aparat desa, termasuk RT/RW
3. Dharma wanita dan PKK di berbagai jenjang

4. LKMD, dan organisasi sosial serupa
5. Ulama dan tokoh-tokoh masyarakat
6. Lembaga swadaya masyarakat
7. BKKBN dan sumber-sumber yang ada padanya
8. Media daerah dan media tradisional
9. Media cetak dan media elektronik
10. Universitas, akademi, perguruan tinggi, dan kelompok intelektual lainnya
11. Badan-badan pengkajian
12. Jajaran Depag
13. Dinas P dan K
14. Orang tua siswa/BP3
15. Dunia usaha dan asosiasi terkaitnya
16. Organisasi profesi.

Informasi yang dihasilkan dari evaluasi dua tahun pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun memberikan gambaran tentang hal-hal berikut.

1. Usaha menggerakkan wajar dikdas 9 tahun sangat bergantung pada prakarsa jajaran Depdikbud menyangkut berbagai urusan dan kegiatan.
2. Tim koordinasi yang telah terbentuk di semua daerah dan tingkatan telah melakukan penegasan tugas dan peranan bagi mereka yang terlibat, namun pelaksanaan kerja koordinatif tersebut relatif terbatas, terutama dari segi substantifnya.
3. Peranan yang relatif aktif dilakukan oleh Kanwil Depdikbud, Depag, Kandedikbud, dinas P dan K, Camat, Bappeda II, Kepala Sekolah, dan Kepala desa.
4. Instansi relatif belum terlibat secara intensif/optimal lewat kegiatan yang berkesinambungan.
5. Usaha-usaha menggerakkan peran serta masyarakat bagi pembangunan pendidikan yang diusahakan secara bijak dan terbuka telah

membawa hasil yang nyata, terutama dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci masyarakat.

Berbagi Peranan

Sering kali terjadi bahwa permasalahan peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan lebih dilihat dari segi berbagi beban dan tanggung jawab. Oleh penekanan pada berbagi beban dan tanggung jawab ini, orang ataupun instansi cenderung memilih keterlibatan minimal bukannya maksimal. Banyak terjadi bahwa orang hanya terbatas mau disebut namanya atau dituliskannya dalam suatu tim pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun. Atau orang-orang seperti ini cukup sesekali hadir atau terwakili dalam berbagai forum rapat, dan lain-lain setara. Keterlibatan minimal ini tentu tidak menguntungkan optimalisasi potensi dan pencapaian usaha pendidikan dari banyak pihak.

Agar hal seperti ini tidak terjadi, mengundang peran serta masyarakat memerlukan strategi yang menumbuhkan kepedulian, kepentingan, dan kesukarelaan mereka. Mereka yang diharapkan berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan perlu memperoleh tempat tertentu (terhormat), memperoleh pengakuan atas keterlibatan mereka. Mereka perlu dilibatkan juga dalam pengambilan keputusan dalam batas-batas posisi mereka. Dengan hal-hal tersebut, kesan bahwa mereka ini menjadi semacam "lembu perah" atau hanya dianggap penting pada waktu dibutuhkan akan dapat dihindari. Oleh sebab itu kelebihan kelompok-kelompok masyarakat ini perlu diinventarisir dan dimanfaatkan.

Cakupan, besaran, dan beban tugas pelaksanaan wajar dikdas 9 tahun sangatlah luas dan berat mengingat sasaran yang akan dicapai dan kendala yang akan dihadapi dalam rentang waktu yang relatif pendek. Hal-hal berikut ini akan dapat memandu memahami pembagian peranan dan tugas bagi pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penuntasan wajar. Penegasan dan penyebaran tugas bagi sejumlah instansi

terlibat pelaksanaan wajar perlu dilakukan baik di tingkat propinsi, kabupaten/kodisa, maupun di tingkatan lainnya.

1. Besarnya garapan kuantitatif dalam kurun waktu penyelesaian wajar lewat spesifikasi: lima tahunan (Repelita), tahunan dan sebarannya atas wilayah: propinsi, kabupaten/kodisa, dan atas unit pelaksana penuntasan yang digunakan.
2. Tingkat mutu pendidikan di sekolah terinci atas sekolah, mata pelajaran, dan wilayah teritorialnya.
3. Kondisi supply dengan rincian daya tampungnya.
4. Kondisi demand atau keinginan bersekolah dan sebarannya atas wilayah.
5. Aneka ragam kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajar dikdas dan potensi-potensi yang dapat dan perlu digali.
6. Hal-hal di atas ini akan dapat menjadi pedoman membagi peranan kepada instansi terkait, baik berdasarkan peta tugas yang secara formal telah ada maupun pengembangan peranan-peranan baru yang dapat ditemukan.

Dalam menggerakkan peran serta masyarakat, hal yang sangat penting dan strategik adalah pengenalan dan penerapan prinsip-prinsip partisipasi. Partisipasi mengisyaratkan perlunya sejumlah kaidah berikut.

1. *Kemitraan dan kebersamaan*. Ini sangat penting sebab pihak yang terlibat perlu memperoleh perlakuan sama dan secara bersama menghadapi permasalahan yang ada.
2. *Berbagi hasil dan keuntungan*. semua yang ikut serta hendaklah merasakan manfaat bagi keterlibatan mereka.
3. *Dapat dan boleh berpendapat*. Peran serta akan lebih mudah dan optimal manakala pihak yang diharapkan terlibat memperoleh kesempatan menyatakan pandangan dan pikiran mereka dalam berbagai hal dengan urusan yang ada.

4. *Transparansi*. Segala sesuatu tentang urusan yang mengundang peran serta hendaklah dikelola secara terbuka dan dapat dilihat orang secara mudah. Setiap keputusan dan kegiatan dapat diikuti dan diketahui khalayak luas.
5. *Saling mempercayai*. Pihak-pihak yang terlibat dalam urusan pendidikan hendaklah saling mempercayai jauh dari syak wasangka dan kecurigaan.
6. *Adanya pertanggungjawaban*. Setiap keputusan dan tindakan hendaklah disertai pertanggungjawaban yang jelas, masuk akal, dan segera.
7. *Penyebarluasan informasi*. Informasi yang benar, cepat, dan memadai sangat diperlukan agar partisipasi dapat digerakkan dan dipertahankan. Perlu diusahakan agar pihak yang terlibat cukup mengerti hal-hal yang sedang terjadi.
8. *Pelayanan yang baik*. Partisipasi akan dapat digerakkan jika pelayanan pendidikan jelas, diterima sebagaimana dijanjikan.

Hal-hal di atas sangat penting agar partisipasi dalam pelaksanaan wajar dikdas dapat digerakkan. Partisipasi masyarakat luas tak akan datang segera cuma-cuma, melainkan lewat usaha keras banyak pihak. Prakarsa dan dukungan lahirnya peran serta berbagai pihak dalam penuntasan wajar dikdas perlu diusahakan.

Peranan Sentral Tetap pada Jaringan Depdikbud

Peranan sentral jaringan Depdikbud terutama pada fase proyek tak disangsikan lagi; pertama dari segi urusan yang secara legal memang berada padanya (perundang-undangan dan peraturan turunannya), kedua sumber daya manusia dan pelatihannya yang secara khusus untuk menanganinya, dan ketiga pandangan yang tersedia untuk berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Namun demikian pada pasca proyek dan pada saat urusan dan penunjangnya di atas kemampuan yang tersedia di jaringan Depdikbud, peran serta instansi dan sektor di luar

Depdikbud akan semakin bertambah besar. Dalam kaitan ini, terutama pada saat transisi dari status proyek ke rutin, peranan sentral jajaran Depdikbud terletak pada kemampuan dan kesediaan memasarkan program pembangunan pendidikan kepada para pemakai pelayanan pendidikan. Mereka yang memiliki potensi besar dalam peran serta pendidikan ini perlu diyakinkan bahwa keterlibatan mereka akan membuat corak pendidikan menjadi berbeda dalam pengertian menjadi lebih baik.

Permasalahan selanjutnya terletak pada pengembangan prinsip pada pengembangan prinsip pelayanan oleh jajaran pendidikan Depdikbud. Baik tidaknya pelayanan yang dapat disajikan kepada para pemakai akan memiliki kaitan dengan tingkat peran serta masyarakat yang dapat digerakkan oleh dunia pendidikan. Ini dapat ditunjukkan pada awalnya oleh tekad melakukan program-program perbaikan pendidikan. Oleh sebab itu penyusunan program-program pendidikan yang menjanjikan perbaikan pendidikan sektor tertentu dan menawarkannya kepada pihak-pihak yang secara potensial dan dilibatkan menjadi sangat penting. Untuk memutuskan program-program perbaikan yang dapat ditawarkan kepada para pengguna pelayanan, jajaran pendidikan dapat mengundang peran serta masyarakat kelompok pemberi jasa pelayanan profesional. Di dalam hal ini, jajaran Depdikbud telah memasuki dimensi peran serta masyarakat juga adanya.

Peran serta masyarakat tidaklah akan datang secara sukarela dan segera setelah terlihat bahwa peran serta mereka itu sangat dibutuhkan. Peran serta pendidikan perlu diekspos ke mereka yang memiliki yang dibutuhkan oleh pendidikan. Ini memberikan indikasi tetap sentralnya peranan jajaran Depdikbud.

Langkah Penting Mengundang Peran Serta Masyarakat

Sesungguhnya keinginan dan usaha menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan bukanlah hal baru. Semenjak Pelita V (GBHN 1988), partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan nasional

telah menjadi salah satu prinsipnya. Empat tahun kemudian, prinsip partisipasi ini telah dijabarkan ke dalam PP. 39/1992 tentang partisipasi masyarakat dalam pembanguna pendidikan. Hal-hal berikut ini perlu dipikirkan agar peran serta masyarakat dalam usaha pendidikan semakin nyata sebagai suatu gerakan yang memiliki dampak usaha pembangunan tersebut.

Mengembangkan partisipasi bertumpu pada model yang telah dipraktikkan dengan perbaikan-perbaikannya. Praktik mengundang peran serta telah diusahakan dari waktu ke waktu dengan skala yang boleh jadi terbatas tingkatannya, orientasinya dan cara-cara yang digunakannya. Dunia pendidikan makin mengutamakan prinsip pelayanan dengan prinsip itu para calon penggunanya akan merasakan adanya (gambaran akan adanya) pelayanan sehingga mereka akan lebih mudah diundang dan dilibatkan. Jajaran pendidikan perlu mengembangkan prinsip profesionalisme dalam semua seginya. Akuntabilitas menjadi bagian penting dalam prinsip pelayanan ini. Jajaran pendidikan perlu secara sungguh-sungguh menerapkan prinsip partisipasi sebagaimana ditunjukkan dalam banyak dimensinya: berbagi kemanfaatan, hak dan tanggung jawab, pelayanan yang ditampakkan, keterbukaan, dapat dipercaya, dan memberikan keputusan kepada penggunanya.

Tentu saja masih banyak hal yang perlu dicari dan dikemas dalam usaha menggerakkan peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan, terutama dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun. Pengenalan potensi peran serta masyarakat oleh jajaran Depdikbud perlu dilakukan dan dimanfaatkan bagi bangkitnya isu peran serta secara luas dan berkesinambungan.

Penutup

Peran serta masyarakat dalam urusan pendidikan tidaklah akan hadir dengan sendirinya tanpa usaha, terutama oleh mereka yang tidak secara langsung mempunyai kepentingan dan keterkaitan dengan

pendidikan. Di balik itu usaha-usaha pendidikan, terutama proses penuntasan wajar dikdas, peran serta masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Walaupun peran serta masyarakat dalam pendidikan ini telah dipraktikkan, cakupan dan kemantapannya relatif masih terbatas. Oleh sebab itu pengembangan partisipasi masyarakat dalam penuntasan wajar dikdas perlu dilakukan secara matang dan berkesinambungan.

Peran yang dapat dan perlu dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu perlu diperjelas dan dengan itu keterlibatan mereka akan lebih terarah. Kemantapan dan kesinambungan peran serta masyarakat dalam usaha pendidikan akan dapat terwujud bilamana kaidah-kaidah mengundang peran serta masyarakat tersebut diterapkan. Untuk itu prakarsa terutama dari yang secara langsung berkepentingan dengan tugas pelaksanaan wajar dikdas perlu dikembangkan.